Pemulihan Ekonomi: Upaya Mengembalikan Keadaan dan Menguatkan Perekonomian Pasca Pandemi COVID-19

Ulyana Mufida/220321100070/Kelas B

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi penyakit coronavirus 2019, atau COVID-19, sedang terjadi di lebih dari 200 negara yang ada di seluruh dunia. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Republik Rakyat China, dan pada tanggal 31 Maret 2020, 719,758 kasus telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, COVID-19 juga menyebabkan 33.673 kematian. Pandemi telah menghasilkan peningkatan pesat dalam penelitian yang berkaitan dengan kondisi. (Setiati and Azwar, 2020). Krisis kesehatan, ekonomi, transportasi, dan sektor lainnya semuanya telah dirusak oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan bencana besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman kesehatan global ini berdampak besar pada semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, keamanan publik, dan aktivitas ekonomi (Baniamin, Rahman and Hasan, 2020). Akibat pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi aktivitas sosial telah menyebabkan banyak kerugian ekonomi di seluruh negeri (Hadiwardoyo, 2020). Menurut (Susilawati, Falefi and Purwoko, 2020), pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai industri, termasuk transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan lainnya. Namun, sektor rumah tangga adalah yang paling terpengaruh oleh pandemik. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa penurunan drastis menyebabkan kelemahan perekonomian dalam aktivitas riil terutama di bidang jasa, pariwisata, dan penerbangan (Perencanaan *et al.*, 2020).

Menurut (Firmansyah *et al.*, 2022) Peluang muncul untuk perubahan yang dimulai oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dari titik awal krisis hingga strategi pemulihan ekonomi. Banyak dari kita berharap bahwa kita dapat mengubah tindakan kita untuk menormalkan ekonomi, meskipun saat ini kita tidak tahu harus berbuat apa untuk memulihkan ekonomi setelah serangan COVID-19. Pandemi Covid-19 mempengaruhi mobilitas masyarakat di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Pembatasan/penutupan sosial pada bulan April dan Mei membatasi mobilitas masyarakat. Sejak pertengahan Mei, penguncian telah dilonggarkan di beberapa bagian negara dan mobilitas orang meningkat, meski belum sepenuhnya kembali normal (Pambudi *et al.,* 2020). Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan, dengan penurunan mobilitas penduduk, yang mengakibatkan penurunan daya beli dan stagnan ekonomi (Salisu and Akanni, 2020). Menurut (Edy Sutrisno, 2021), karena sifat virus yang menular dan mobilitas orang di seluruh dunia serta rantai nilai global yang sangat terhubung, pandemi ini memiliki dampak negatif yang cepat menyebar ke seluruh dunia. Beberapa lembaga riset terkemuka di seluruh dunia memperkirakan konsekuensi negatif dari penyebaran pandemi ini terhadap ekonomi dunia. Kebijakan pemutusan sebaran virus (containment virus secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan

ekonomi secara maksimum) harus disesuaikan dengan benar untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Menteri PPN menyatakan bahwa terdapat 41 proyek besar untuk pemulihan ekonomi, masing-masing senilai Rp 62,1 triliun dan proyek tambahan senilai Rp 36,2 triliun. Fokus proyek utama pemulihan ekonomi termasuk 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di 5 subsektor prioritas, pelatihan dan pendidikan vokasi untuk industri 4.0, jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, dan penguatan jaminan usaha. Selain itu, proyek ini juga mencakup 350 korporasi petani dan nelayan. Banyak lembaga riset terkemuka di seluruh dunia telah memperkirakan dampak negatif wabah ini terhadap ekonomi dunia. Misalnya, IMF memproyeksikan penurunan ekonomi global sebesar 3% pada tahun 2020; JP Morgan memproyeksikan penurunan sebesar 1,1% pada tahun 2020; EIU memproyeksikan penurunan sebesar 2,2%; dan Fitch memproyeksikan penurunan sebesar 1,9%. Dalam situasi terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 0,4%, menurut prediksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Sulisyawan *et al.*, 2021). Tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pendapatan negara dan kesejahteraan negara, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Akibatnya, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, perlu dilakukan penelitian kritis tentang tingkat kepuasan kerja yang masih sangat rendah. Di antara dampak ekonomi COVID-19, hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik kehilangan pekerjaan mereka, sebuah jumlah yang signifikan. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta orang di seluruh dunia, dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan dan berbagai kemungkinan (Tahliani, 2020).

Penelitian ini melakukan observasi dan analisis terhadap kondisi perekonomian pasca COVID-19. Bagaiamana pemerintah dapat memulihkan dengan kebijakan yang akan diberikan dan solusi yang tepat untuk bisa menyembuhkan negara. Pemerintah terus mengupayakan agar dapat melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan bekerja sama dengan seluruh masyarakat. Sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah daerah harus mendukung penuh upaya ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Serta masyarakat yang terus berusaha untuk bisa tetap bertahan (survive) dari pandemic yang terjadi dan tetap sejahtera untuk terus bisa hidup. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengetahuan mengenai apa yang terjadi saat pemulihan perekonomian yang dapat meningkatkan data beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta insentif pemerintah pasca COVID-19 dan solusi yang diberikan oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

Menurut (Rosita, 2020), COVID-19, virus corona yang menyebabkan flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Pada 2019,

Wuhan, di Provinsi Hubei, China, adalah tempat virus pertama kali muncul. WHO telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan global. Kegiatan sehari-hari manusia sempat terhambat oleh virus ini. Karantina saja mungkin kurang cukup dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 itu muncul, dan dampak pandemi ini semakin memprihatinkan di seluruh dunia. (Sohrabi *et al.*, 2020). Karena penyakit COVID-19, atau virus corona 2019, telah diumumkan sebagai pandemi, Indonesia harus waspada dan tanggap. Ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar, mencakup hal-hal seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, keamanan, pertahanan, serta kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada sarana prasarana dan petugas kesehatan; masyarakat dan sistem kesehatan yang mendukung juga harus terlibat (Putri, 2020). Pandemi COVID-19 telah membawa ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, yang membuat mereka tidak nyaman. Di sisi lain, pandemi ini telah memiliki dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, yang membuat mereka tidak nyaman. Jika seseorang sudah terjangkit virus yang sangat ganas ini, kematian hampir pasti akan datang (Taib and Supriana, 2020).

Di antara dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian negara Indonesia telah banyak dibahas, termasuk pembatasan aktivitas dan kerugian ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan perekonomian nasional tetap berjalan, baik di tingkat individu maupun perusahaan. Menurut (Yulianto, H, 2020) Pandemi COVID-19 adalah masalah kesehatan luar biasa yang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang cepat memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sebagian besar negara di seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang. Resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut, atau penurunan Product Domestic Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Resesi terjadi ketika kegiatan ekonomi menurun secara signifikan selama beberapa bulan atau bahkan tahunan, seperti yang terjadi saat ini karena pandemi COVID-19.

B. Konsep-Konsep Pemikiran

Ekonomi adalah komponen terpenting dalam kehidupan manusia, dan kebutuhan ekonomi sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, mereka membutuhkan kekuatan keuangan yang kuat. Ekonomi adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia. Selain menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, ekonomi juga mendukung pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara harus membuat kebijakan untuk mengawasi ekonomi Indonesia dan melindungi ekonomi negara itu sendiri (Hanoatubun, 2020).

Menurut (eri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, 2020), Dalam menangani pandemi ini, pemerintah harus membuat kebijakan dua arah. Pemerintah harus

mempertimbangkan kebijakan substansial pencegahan dan berkonsentrasi pada kebijakan yang mengatur ekonomi. Implementasi kedua kebijakan tersebut tidak efektif karena keduanya dilakukan secara bersamaan. Kebijakan tersebut tidak hanya tidak efektif dalam menerapkannya, tetapi juga menyebabkan koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Tujuan kebijakan, yaitu menghentikan rantai penyebaran virus dan meningkatkan ekonomi, belum tercapai, dan malah semakin parah.

Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi menurun sebagai akibat dari pembatasan sosial atau fisik ini (Iskandar, Possumah and Aqbar, 2020). Menurut (Yamali and Putri, 2020), COVID-19 menghancurkan surplus ekonomi dan mengganggu mekanisme pasar, tetapi virus itu juga memberi manfaat kepada perekonomian Indonesia karena membuka peluang ekspor di pasar lain selain China. Pandemi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Ini karena pandemi mendorong pemerintah untuk memprioritaskan daya beli di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah dapat menjamin investasi tetap stabil meskipun pertumbuhan ekonomi global saat ini terancam. Kebangkitan UMKM yang terus meningkat akan menjadi pusat kekuatan ekonomi di era ekonomi digital pasca COVID-19. (Deri Firmansyah, 2022).

C. Variabel Dan Indikator Yang Dibahas

Menurut (Teguh Ali Fikri, 2021), Pemerintah harus tetap memperhatikan pertumbuhan lapangan pekerjaan sambil mengoptimalkan penurunan angka kasus COVID-19 dengan mengirimkan vaksin, memberikan bantuan sosial, dan mendorong orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena di era digital yang tidak terlalu terdampak dari covid-19, pertumbuhan UMKM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selama pandemi COVID-19, banyak bisnis mengalami bangkrut dan kolep, yang dapat mengakibatkan pemecatan karyawan, pemutusan hubungan kerja, atau keduanya. Karena pandemi COVID-19, banyak perusahaan terkena dampak karena banyaknya jumlah biaya yang terus dikeluarkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, banyak perusahaan mengurangi karyawan dan memotong biaya iklan. (Selawati, 2022). Setelah pandemi COVID-19, ancaman terhadap ekonomi terus berlanjut karena penyebaran virus secara massif terus berlanjut. Akibatnya, gelombang kedua kekhawatiran lebih buruk daripada gelombang pertama yang telah menyebabkan ekonomi runtuh sejauh ini. Untuk memastikan bahwa Indonesia akan bangkit dari pandemi COVID-19, para aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam memajukan pemerintahan Indonesia harus bekerja sama secara sinergis dan kolaborasi penuh dalam inovasi dan perilaku yang adaptif. Oleh karena itu, Indonesia harus berbenah dengan segala sumber dayanya melalui kerja sama stakeholder. (*et al.*, 2020)

Dengan kebijakan yang dibuat, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat, industri, dan akademisi saat ini untuk mengatasi krisis ekonomi pasca COVID-19. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat harus dapat mencapai dan memenuhi kebutuhan ketiga komponen tersebut agar dapat bertahan secara normal dan memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan ekonomi. Jika kebijakan yang dimaksud diterapkan melalui kerja sama yang lebih baik

di antara semua sektor terkait, optimalisasi kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi perdebatan. Kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan perguruan tinggi sangat penting untuk penyebaran informasi dan penerapan kebijakan. Baik krisis keuangan maupun pandemi COVID-19 mengurangi daya beli masyarakat karena kebijakan PSBB untuk keselamatan bersama. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang meminta orang untuk tidak mudik atau pulang kampung dahulu juga mempengaruhi UMKM. Dampak yang dialami UMKM sangat besar sehingga banyak dari mereka memutuskan untuk menutup bisnis mereka. Menurut (Sulisyawan *et al.*, 2021), Selama pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun, dan produktivitas tenaga kerja juga menurun di Indonesia. Selain itu, penggunaan transportasi kurang dan tingkat pengangguran tinggi. Permasalahan tersebut berdampak signifikan terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sangat lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut (Teguh Ali Fikri, 2021), Sudah jelas bahwa peningkatan kasus COVID-19 tidak hanya akan berdampak pada sosial dan kesehatan, akan tetapi juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan yang signifikan sejak virus COVID-19 muncul pada bulan Maret 2020. Pembatasan sosial bersekala yang signifikan (PSBB) menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua, menyebabkan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) mencapai -3,49% pada triwulan ketiga, yang menandakan bahwa Indonesia telah masuk ke dalam resesi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja mereka dan banyak perusahaan harus memberhentikan operasinya. Menurut penelitian (Kasnelly 2020), Riset menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dan diperkirakan akan meningkat jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah tersebut. Angka pengangguran yang terus meningkat, peraturan pemerintah tentang penutupan, PSBB, dan sosial distancing, serta banyaknya PHK yang terjadi selama pandemi ini, adalah penyebab utamanya (Fahri, Jalil and Kasnelly, 2020).

Menurut (Nasution, Erlina and Muda, 2022), Dalam studinya, dia juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan masyarakat sangat berhati-hati saat membeli barang dan bahkan mempertimbangkan kembali untuk melakukan investasi, yang mengakibatkan peningkatan pasar yang negatif. Ada penurunan daya beli masyarakat dan penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi nasional.Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi karena PPKM dan aturan yang memperketat aktivitas mereka. Karena PPKM, berbagai sektor menghadapi regulasi pengetatan.

Menurut (Yamali and Putri, 2020), Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan baru dan memperkenalkan paket stimulus yang belum pernah terlihat sebelumnya sebagai tanggapan atas pandemi COVID-19. Proses implementasi kebijakan harus memenuhi harapan dan mampu mencapai tujuan melalui beberapa komponen yang saling terkait. Peraturan Presiden, dua

Peraturan Presiden, satu Peraturan Kabinet, satu Instruksi Presiden dan satu Peraturan Kabinet pengganti undang-undang. Kebijakan-kebijakan ini adalah tanggapan dan solusi alternatif atas dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat, dampak administrasi, politik pemerintahan, kewenangan, serta masalah keuangan Negara Indonesia.

PENDEKATAN

Untuk memberikan gambaran tentang subjek penelitian, yaitu dokumen atau catatan yang dipublikasikan terkait pemulihan ekonomi pasca COVID-19, penelitian ini menggunakan metode sebuah analisis deskriptif dengan pendekatan terhadap penulisan kualitatif. Untuk mencapai tujuan ini, referensi data yang ada di jurnal dikumpulkan untuk menganalisis atau menginterpretasikan bahan tertulis atau referensi. Analisa deskriptif adalah uraian kata-kata yang menjelaskan bagaimana masalah diselesaikan selama pandemi COVID-19 dan bagaimana perekonomian Indonesia pulih setelah pandemic serta peran pemerintah dan Seluruh masyarakat juga perlu berusaha untuk tetap bertahan karena wabah virus ini menciptakan banyak hal baru yang terjadi. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini termasuk berbagai buku teks, artikel, jurnal, dan prosiding yang tersebar di seluruh negara dan dunia; selain itu, laman web, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan berita online.

PEMBAHASAN

Selama pandemi COVID-19, hampir seluruh negara mengalami kesulitan ekonomi karena terbatasnya mobilitas manusia dalam melakukan segala jenis aktivitas. Oleh karena itu, negara-negara harus menjadi inovatif ketika mereka membuat rencana pemulihan ekonomi mereka. Dengan cara ini, perekonomian global diharapkan dapat bangkit secara bertahap untuk kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menurun sebesar -0,7%, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis pada tahun tersebut karena pergerakan ekonominya yang tidak stabil. Konsumsi pemerintah menurun dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen karena pemerintah mengurangi alokasi untuk infrastruktur pada tahun 2020 dan meningkatkan anggaran kesehatan sesuai dengan fokus pemerintah untuk menangani pandemi di Indonesia. Selain konsumsi, investasi juga mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 1,94%, yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Pengaruh penurunan lapangan kerja lebih besar daripada penurunan investasi. Ekspor dan impor dengan negara asing juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari -0,87% menjadi -7,70% dan impor dari -7,69% menjadi -17,71%. Penurunan yang signifikan ini mempengaruhi nilai ekspor neto selama kontraksi ekonomi.

Menurut (Hidayat and Surya, 2022), Pasca keterpurukan tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berharap dapat menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten dan bekerja sama dengan masyarakat luas. Sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah daerah harus mendukung penuh upaya ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain memahami kondisi sosial ekonomi, demografi, dan struktur ekonomi daerah selama Pandemi, pemerintah daerah bertanggung jawab secara strategis untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi. Kebijakan yang ditetapkan dalam APBD adalah tolak ukur utama bagi pemerintah daerah untuk mendorong pemulihan perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran strategis untuk menjalankan kebijakan dengan lancar dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, mereka bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali bisnis para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Dalam kerangka stimulus PEN, pemerintah memperluas, memperkuat, dan mendorong program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk membantu daya beli dan konsumsi kelompok miskin dan rentan. Program perlindungan sosial adalah salah satu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) (Marlinah. Lilih, 2021). Jutaan orang bekerja di berbagai pekerjaan berpenghasilan rendah, seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, supir, nelayan, dan lainnya, dan PEN menawarkan berbagai program bantuan sosial. Dukungan positif yang bersifat intervensi langsung, seperti Program Keluarga Harapan serta Diharapkan akan membantu mencegah kebangkrutan, mencegah pemutusan hubungan kerja, dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Pemerintah bergerak cepat untuk mendorong bisnis untuk kembali beroperasi karena banyak bisnis dan industri yang mengalami kesulitan. Salah satu kebijakan utama dalam mendorong sisi penawaran adalah insentif perpajakan dunia usaha, dengan anggaran total Rp120,61 triliun. Selain memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, UMKM juga sangat rentan di tengah pandemi ini. Melalui berbagai pilar, Program PEN mendukung UMKM dengan total Rp123,46 triliun, termasuk insentif pajak yang ditanggung pemerintah atas PPh final UMKM dan program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM, yang memungkinkan UMKM untuk membayar angsuran dan bunga kredit dengan lebih mudah. Pemerintah menjamin bahwa program penyaluran benar-benar tepat sasaran dan diawasi dengan baik. Kreditor yang ingin menerima pinjaman harus memenuhi beberapa syarat, seperti memenuhi batas pinjaman, tidak terdaftar dalam daftar hitam, dan memiliki riwayat kredit yang baik sebelum pandemi COVID-19. PMK nomor 65/PMK.05/2020 mengatur skema penyaluran fasilitas ini, yang diubah menjadi PMK nomor 85/PMK.05/2020 untuk menyederhanakan dan menetapkan batas waktu pelaksanaan (Harjowiryono and Siallagan, 2021).

Menurut (Ignatius and Gultom, 2020) Selain itu, UU Cipta Kerja Pasca Pandemi menjalankan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan. Untuk meningkatkan investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, undang-undang ini akan memfasilitasi usaha di semua sektor. Salah satu dampak dari UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), yang diberlakukan pada 9 Agustus 2021. Selain itu, pemerintah memperluas jalur investasi bersama dengan insentif pajak dan bukan pajak untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah terus mendorong program hilirisasi untuk membangun struktur industri yang kuat dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga industri manufaktur menjadi kompetitif dan ramah lingkungan di pasar global. (Arijo, 2021). Semua orang ingin pemulihan ekonomi Indonesia terjadi. Kerjasama seluruh masyarakat, khususnya di bidang sosial, ekonomi dan kesehatan, merupakan hal yang sangat penting.

KESIMPULAN

Dalam kondisi ini pemerintah dan masyarakat harus bisa saling kontribusi Bersama, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan untuk membantu perekonomian Indonesia bangkit kembali. Pemerintah daerah dapat menggunakan APBD sebagai dasar untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan ini karena mereka memiliki peran strategis untuk menjalankan kebijakan dengan lancar dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah untuk menghidupkan kembali usaha kecil dan menengah (UMKM). Salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jutaan orang bekerja dalam berbagai pekerjaan berpenghasilan rendah seperti petani, pemilik toko, buruh bangunan, buruh pabrik, supir, nelayan dan lain-lain, dan PEN menawarkan berbagai program bantuan sosial . Diharapkan bahwa dukungan yang baik dan bersifat intervensi langsung, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), akan mengurangi kebangkrutan, mengurangi kehilangan pekerjaan, dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Karena banyak industri dan bisnis mengalami kesulitan, pemerintah segera bertindak untuk mendorong bisnis untuk kembali beroperasi. Pasca pandemi, UU Cipta Kerja melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memutus mata rantai kemiskinan. Undang-undang ini membantu perusahaan di semua industri meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Semua orang berharap untuk memahami pemulihan ekonomi Indonesia. Kerjasama seluruh masyarakat, khususnya di bidang sosial, ekonomi dan kesehatan menjadi pendorong utama untuk mencapai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arijo, P. (2021) *Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif Di Era New Normal*. Available at: http://isei.or.id/explorer/20210303200230_Kajian_Kebijakan_Publik_2.0.pdf.

Baniamin, H.M., Rahman, M. and Hasan, M.T. (2020) 'The COVID-19 pandemic: Why are some countries coping more successfully than others?', *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42(3), pp. 153–169. Available at: https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1784769.

Edy Sutrisno (2021) 'Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata', *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), pp. 167–185. Available at: https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385.

eri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, S.N. (2020) 'Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities,* Vol. 1 No.(2), pp. 130–139. Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.

Deri Firmansyah, Asep Suryana, Asep Achmad Rifa'i and Dede Dr (2022) "PMD (PELATIHAN MEDIA DIGITAL) SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL HANDYCRAFT BAMBU DI KAA SUKABUMI GUNA MENINGKATKAN PEMASARAN ONLINE BERBASIS MARKETPLACE DI ERA EKONOMI DIGITAL", *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(10), pp. 2805–2816. doi: 10.53625/jabdi.v1i10.1633.

Fahri, Jalil, A. and Kasnelly, S. (2020) 'Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 45–60. Available at: http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/142.

Firmansyah, D. *et al.* (2022) 'Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(4), pp. 476–499. Available at: https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602.

Hadiwardoyo, W. (2020) 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83–92. Available at: https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92.

Harjowiryono, M. and Siallagan, W.A. (2021) 'Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), pp. 263–287. Available at: https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.425.

Hidayat, A.T. and Surya, F. (2022) 'Pengembangan Pariwisata Dan Pelestarian Seni Budaya Guna Peningkatan Keberdayatahanan Desa Jenisgelaran Pasca Pandemi Covid-19', *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*, 4(1), pp. 13–20. Available at: https://doi.org/10.26533/sneb.v4i1.997.

Ignatius, R. and Gultom, S. (2020) 'PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA Ricky Ignatius Sadana Gultom', pp. 697–704.

Iskandar, A., Possumah, B.T. and Aqbar, K. (2020) ‘Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19’, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7). Available at: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544.

Maiti and Bidinger (1981) *Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Available at: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17539.

Marlinah. Lilih (2021) ‘Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021’, *Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional*, 4(98), pp. 73–78.

Nasution, D.A.D., Erlina, E. and Muda, I. (2022) ‘Evaluasi Upaya Pemerintah Terhadap Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh’, *Jurnal Benefita*, 5(2), p. 212.

Pambudi, A.S. *et al.* (2020) ‘Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume’, *Majalan Media Perencanaan*, 1(1), pp. 1–21. Available at: https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/1.

Perencanaan, K. *et al.* (2020) ‘Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia’, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp. 240–252. Available at: https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118.

Putri, R.N. (2020) ‘Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), p. 705. Available at: https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010.

Rosita, R. (2020) ‘Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia’, *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), p. 109. Available at: https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380.

Salisu, A.A. and Akanni, L.O. (2020) ‘Constructing a Global Fear Index for the COVID-19 Pandemic’, *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), pp. 2310–2331. Available at: https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785424.

Selawati, N. (2022) ‘Jurnal Syntax Transformation’, 3(3), pp. 147–156.

Setiati, S. and Azwar, M.K. (2020) ‘COVID-19 and Indonesia’, (April).

Sohrabi, C. *et al.* (2020) ‘World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19)’, *International Journal of Surgery*, 76(February), pp. 71–76. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034.

Sulisyawan, A. *et al.* (2021) ‘Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19 Melalui Sektor Pariwisata’, *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 2(1), pp. 91–108. Available at: http://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin/article/view/34.

Susilawati, S., Falefi, R. and Purwoko, A. (2020) ‘Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia’, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal):*

Humanities and Social Sciences, 3(2), pp. 1147–1156. Available at: https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954.

Tahliani, H. (2020) 'Tantangan perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', *Madani Syariah*, 3(2), pp. 92–113. Available at: file:///D:/zinggris literatur/TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH.pdf.

Taib, Z. and Supriana, T. (2020) 'Perspektif Ekonomi Pada Era New Normal Pasca Covid-19', *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), pp. 108–118.

Teguh Ali Fikri, Y. (2021) 'Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia', *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), pp. 107–116. Available at: https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59.

Yamali, F.R. and Putri, R.N. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), p. 384. Available at: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.

et al. (2020) 'Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia', *Sosio Informa*, 6(2). Available at: https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332.